

Konstruksi Gender dan Kebijakan Mitigasi Bencana pada Pekerja Perkebunan Kopi di Lereng Gunung Argopuro

M Khoirul Hadi al Asy Ari^{a,1}, Rifka Herliani^{a,2,*}, Agustin Lisnawati^{a,3}

^a IAIN Jember, Jl. Mataram No.1, Kab. Jember, Jawa Timur-68136, Indonesia

¹ hrifka@gmail.com*

* Korespondensi Penulis

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Diterima : 1 Desember 2019

Direvisi : 10 Desember 2019

Disetujui : 20 Desember 2019

Kata Kunci

Disaster mitigation

Gender construction

Coffee plantation workers

Mitigasi bencana

Konstruksi gender

Pekerja perkebunan kopi

ABSTRAK

This article aims to understand how gender construction and disaster mitigation policy for coffee plantation workers on the mountain slopes of Argopuro. In this article there are three focus questions: First, what is the gender construction of coffee plantation workers? Second, how is disaster mitigation management based on coffee plantation workers? Third, how is the construction of gender-based disaster mitigation management policies for coffee plantation workers? This article uses a descriptive exploratory method with a sociological approach. For answering those three focus questions in this article, it is using the perspective of Peter Berger's social construction, where there are three dialectical phases in the process of interpreting individuals with their social world, namely internalization, objectivation and externalization. The objectivation and internalization phase are the process of understanding the workers regarding the management of gender-based disaster mitigation policies. The objectivation and externalization phase are processes of assessing the management of gender-based disaster mitigation policies. It can be concluded that the involvement of women in work activities has shown a form of gender responsiveness, but in disaster mitigation policy management has not been gender responsive.

Artikel ini bertujuan untuk memahami bagaimana konstruksi gender dan kebijakan mitigasi bencana bagi para pekerja perkebunan kopi di lereng gunung argopuro. Dalam artikel ini ada tiga fokus pertanyaan, *Pertama*, bagaimana konstruksi gender pekerja perkebunan kopi? *Kedua*, bagaimana manajemen mitigasi bencana berbasis pekerja perkebunan kopi? *Ketiga*, bagaimana konstruksi gender berbasis manajemen kebijakan mitigasi bencana bagi pekerja perkebunan kopi? Artikel ini menggunakan metode deskriptif eksploratif dengan pendekatan sosiologis. Adapun untuk menjawab tiga fokus pertanyaan dalam artikel ini, menggunakan perspektif konstruksi sosial Peter Berger, di mana ada tiga fase dialektis dalam proses pemaknaan individu dengan dunia sosialnya yaitu internalisasi, objektivasi dan eksternalisasi. Fase objektivasi dan internalisasi merupakan proses pemahaman para pekerja mengenai manajemen kebijakan mitigasi bencana berbasis gender. Fase objektivasi dan eksternalisasi merupakan proses menilai manajemen kebijakan mitigasi bencana berbasis gender. Dapat disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas kerja sudah menunjukkan bentuk responsif gender, tetapi dalam manajemen kebijakan mitigasi bencana belum responsif gender.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan di Asia Tenggara terkenal akan potensi Sumber Daya Alamnya yang melimpah. Ditinjau dari letak geologisnya, Indonesia dapat dikategorikan menjadi 3 daerah, yaitu daerah dangkalan Sunda, daerah dangkalan Sahul, dan daerah antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Sedangkan dari segi jalur pegunungan, kepulauan Indonesia terletak diantara dua rangkaian pegunungan muda yaitu pegunungan Sirkum Mediterania dan pegunungan Sirkum Pasifik. Akibatnya, Indonesia menjadi negara yang rentan terhadap bencana terutama gempa bumi.

Pada tahun 2015, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 1.732 bencana alam yang terjadi di seluruh Indonesia. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 2.384 bencana yang terjadi (Bencana, 2016). Kemudian pada tahun 2017 terdapat 2.175 kejadian bencana juga di seluruh Indonesia (Kurniasari, 2017). Dan pemutakhiran data pada tahun 2018, BNPB mencatat sebanyak 513 bencana alam yang terjadi dari bulan Januari-Maret (Kurniasari, 2017). Kejadian-kejadian pada tahun sebelumnya seharusnya menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk mencegah bencana yang mungkin akan terjadi sewaktu-waktu. Akan tetapi, berdasarkan informasi kejadian bencana alam pada 2018 lalu, penyebab dominan adalah ulah manusia bukan faktor alam. Dalam hal ini, BNPB tetap menjadi sorotan warga untuk meningkatkan upayanya dalam memberikan pemahaman serta kewaspadaan bencana kepada warga.

Termasuk lereng gunung Argopuro yang terletak di Kabupaten Jember Jawa Timur memiliki tujuh titik rawan bencana. Sebagaimana pada tahun 2006 lalu telah terjadi bencana banjir bandang yang memporak-porandakan hunian penduduk dan menewaskan sekitar 100 orang. Ternyata tidak hanya cukup pada waktu itu, pada tahun 2016 kembali terjadi bencana tanah longsor yang berpotensi terjadinya banjir bandang jika intensitas hujan cukup tinggi. Kemudian pada 2017, hujan deras yang mengguyur lereng Gunung Argopuro terjadi lagi hingga satu keluarga tertimbun dan rumahnya rusak. Juga terdapat 2 ekor sapi dan 12 ekor kambing yang terkubur (Kurniasari, 2017). Muhandari (46) yang pernah menjadi mandor di perkebunan kopi juga mengatakan bahwa hampir setiap satu tahun sekali terjadi bencana banjir yang bisa saja berpotensi banjir bandang dan bisa saja tidak. Sebab tergantung intensitas hujan yang turun.

Dalam sekian bencana tersebut, beberapa pihak yang terlibat adalah TIM-Badan SAR Nasional, Banser, TNI, Polisi, Kepala Desa, Koordinator Pengungsi dan warga laki-laki. Keterlibatan penduduk menurut Iis (51) dan Ida (50) selaku pekerja perkebunan kopi hanya didominasi laki-laki dan itupun menurutnya jika dibandingkan dengan jumlah orang yang lari bersama istri untuk mencari perlindungan masih lebih banyak warga yang mengungsi. Di lereng gunung argopuro ini, pemahaman tentang kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan di sektor publik khususnya dalam hal mitigasi bencana masih *primitif*. Menurut Muhandari yang pernah menjadi mandor di perkebunan kopi, secara psikologi orientasi pemikiran perempuan hanya tertuju pada urusan dapur, bahkan saat terjadi bencana banjir bandang perempuan baik ibu dan anak hanya menangis sebab trauma. Terlebih saat ia beranggapan bahwa saat terjadi bencana yang ada dalam pikiran perempuan hanyalah kekhawatiran terhadap harta benda yang hanyut terseret arus bahkan rusak begitu saja. Ia juga mengatakan tindakan preventif yang sering dilakukan selama ini oleh pimpinan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) kopi adalah mengalihkan karyawan-karyawan ke yayasan/direksi PDP yang jauh dari lokasi pabrik. Selanjutnya Sulip (36) juga mengatakan bahwa selama ini ketika hujan deras mengguyur, para pekerja selalu dihimbau untuk segera turun dari lereng perunungan agar tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Sedangkan jika tidak begitu deras, para pekerja di perkebunan tetap melanjutkan aktivitasnya. Dalam hal keterlibatan, Sulip mengakui bahwa ia tidak pernah terlibat dalam menangani dan mengurangi resiko bencana yang terjadi sebab ia merasa kondisinya yang tidak sekuat laki-laki. Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan peran atau kedudukan antara laki-laki dan perempuan di lereng Gunung Argopuro terdapat kesenjangan berupa akses, partisipasi, dan kontrol terhadap upaya mitigasi bencana.

Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu adanya upaya konstruksi gender dalam hal manajemen bencana dan kebijakan pengarusutamaan gender dalam mitigasi bencana. Sebab dengan demikian, implikasi peran serta antara laki-laki dan perempuan dalam mengurangi resiko bencana merupakan representasi atas responsif gender. Bertolak dari latar belakang tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang upaya membangun kesetaraan peran dan kebijakan dalam mitigasi

bencana bagi para pekerja perkebunan kopi di lereng Gunung Argopuro dengan mengangkat judul “konstruksi gender dan kebijakan mitigasi bencana pada pekerja perkebunan kopi di lereng gunung argopuro”, adapun fokus pertanyaan penelitiannya adalah *pertama*, bagaimana konstruksi gender pekerja perkebunan kopi? *Kedua*, bagaimana manajemen mitigasi bencana berbasis pekerja perkebunan kopi? *Ketiga*, bagaimana konstruksi gender berbasis manajemen kebijakan mitigasi bencana bagi pekerja perkebunan kopi?. Adapun metode penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif dengan jenis deskriptif eksploratif.

2. Metode

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan *case study* (studi kasus). *Case study* atau *field research* dan eksploratif dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Dalam pengumpulan data dalam studi ini, penulis menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, serta pelaporan hasilnya. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung, dan data sekunder yang diperoleh melalui buku, karya ilmiah, jurnal, dan lain sebagainya.

3.2. Subyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan lereng Gunung Argopuro Panti Kabupaten Jember. Subyek dalam penelitian ini adalah yang terlibat dalam perkebunan kopi, yakni mandor perkebunan kopi dan pekerja perkebunan kopi.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan yakni tentang segala hal yang berkaitan dengan konstruksi gender dan manajemen mitigasi bencana berbasis para pekerja perkebunan kopi. Sedangkan observasi adalah pengamatan yang dilakukan untuk mengetahui realitas/ keadaan di kawasan lereng Gunung Argopuro. Dan dokumentasi merupakan proses mengumpulkan data yang dalam hal ini penulis memanfaatkan *recorder* untuk merekam data dari subyek penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konstruksi Gender bagi para Pekerja Perkebunan Kopi

Adapun konstruksi Konstruksi dalam gender berangkat dari teori dasar tentang konstruksi sosial yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Teori konstruksi sosial memiliki makna sebuah pandangan kepada kita bahwa nilai, ideologi, institusi sosial adalah buatan manusia.

Konstruksi gender dapat diartikan dengan suatu pandangan bahwa konsep kesetaraan peran antara perempuan dan laki-laki bisa dibentuk atau dibangun melalui proses dialektika seseorang (Rusmadi, 2017). Proses dialektika menurut Berger dan Luckman dibagi menjadi tiga yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Wulandari, 2020). pertama eksternalisasi, yaitu suatu usaha manusia mencurahkan dirinya ke dalam dunia baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Dalam mencapai kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, pola konstruksi yang terbangun oleh para pekerja di perkebunan kopi lereng Gunung Argopuro dikarenakan adanya realitas sosial bahwa perempuan desa lazim bekerja membantu suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua objektivasi, yaitu suatu hasil berupa mental maupun fisik yang telah dicapai setelah melalui proses eksternalisasi. Pada proses ini, anggapan bahwa perempuan desa lazim bekerja membantu suami kemudian menjadi adat istiadat yang melekat dalam pikiran mereka sehingga terciptalah prinsip bahwa perempuan desa harus bekerja. Dan ketiga internalisasi, yaitu suatu proses penyerapan kembali dunia objektif menjadi sebuah kesadaran sehingga subjektivitas individu dipengaruhi oleh struktur sosial yang artinya bahwa struktur sosial tersebut akan menjadi gejala realitas sosial diluar kesadarannya sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadarannya. Pada tahap terakhir ini, para pekerja perkebunan kopi tersebut kemudian mengaktualisasikan dirinya sebagai istri yang harus bekerja atas dasar

kesadaran bahwa ia memiliki peran penting dan dibutuhkan dalam keluarga. Iis (51) bekerja lebih intens di perkebunan kopi daripada suaminya. Jari-jari tangannya yang kasar dan membesar merupakan representasi kerja kerasnya selama ini bekerja di perkebunan kopi. Ida (50) persepsinya dalam bekerja karena ia melihat peluang di perkebunan kopi yang bisa membantu keluarganya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Disamping itu, yang menyebabkan ia terdorong untuk bekerja sebab ia menyadari sebagai perempuan yang potensial dan perlu aktualisasi diri di dalam lingkungan. Kemudian Sulip (36) yang memiliki semangat tinggi dalam bekerja sebab ia melihat adat istiadat yang sudah terkonstruksi di lingkungannya bahwa perempuan harus bekerja seperti laki-laki.

Melihat dari proses konstruksi gender yang sudah terbangun oleh penduduk perempuan di lereng Gunung Argopuro menunjukkan bahwa kesadarannya dalam mengaktualisasikan diri di sektor publik sebagai salah satu eksistensi bahwa perempuan desa juga potensial dan sama seperti perempuan-perempuan kota pada umumnya yang memiliki peluang lebih untuk berperan di sektor publik.

3.2. Manajemen Mitigasi Bencana Banjir Berbasis Pekerja Perkebunan Kopi

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 33 Tahun 2006 mitigasi bencana diartikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana baik bencana alam, bencana ulah manusia maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat. Mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi dampak bencana sebelum bencana itu terjadi serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari segala ancaman bencana yang mungkin terjadi. Sebab bencana dapat berdampak pada material, fisik, dan psikis seseorang. Pengemban tugas dalam memanjaj penangan bencana adalah aparat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Di Indonesia potensi bencana diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu potensi bahaya utama (*main hazard potency*) dan potensi bahaya ikutan (*collateral hazard potency*). Sebagaimana di lereng Gunung Argopuro, potensi bahaya utama adalah bencana tanah longsor dan banjir bandang. Hal ini disebabkan karena geyuran hujan yang terlalu deras dan kurangnya pencegahan dini yang seharusnya dilakukan oleh pihak setempat. Sedangkan potensi bahaya ikutan dapat dilihat dari likuifaksi, persentase bangunan yang terbuat dari kayu, kepadatan bangunan, dan arah bangunan.

Di lereng Gunung Argopuro keterlibatan pekerja perkebunan kopi dalam memanjaj mitigasi bencana belum teraktualisasi. Secara penuh, mereka masih dikondisikan oleh pimpinan/direksi PDP pabrik kopi. Ketika tanda-tanda bencana tanah longsor atau banjir sudah nampak terlihat atau terasakan, para pekerja atau karyawan segera dialihkan ke kantor direksi yang berada di sekitar kota Jember. Setelah banjir surut, maka para pekerja tersebut dialihkembalikan kepada lokasi semula, ke pemukiman lereng Gunung Argopuro atau ke pabrik. Sebagaimana tinjauan historis, pada tahun 2006 lalu saat terjadi banjir bandang, menurut Muhandari (46) para pekerja yang berhasil diselamatkan dialihkan ke tempat pemukiman di GOR Jember selama kurang lebih 8 bulan. Di sela-sela waktu tersebut, seiring dengan surutnya banjir bandang para pekerja tetap dialihkan kembali pada pabrik untuk melanjutkan pekerjaan yang sempat mengalami kemandegan akibat adanya bencana. Melihat peristiwa tersebut, secara tidak langsung sejak beberapa tahun lalu hingga sekarang, kontrol atau manajemen mitigasi bencana tetap didominasi oleh pimpinan atau direksi PDP, jajaran aparat pemerintah, PMI, TIM BASARNAS dan kaum laki-laki yang bermukim di daerah tersebut.

Berdasarkan analisis informasi sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, belum adanya keterlibatan peran serta para pekerja perempuan di perkebunan kopi disebabkan karena masih mengentalnya budaya patriarki, dimana perempuan masih dianggap lemah sehingga tidak memiliki kesempatan dalam akses dan berpartisipasi untuk mengurangi dampak resiko dari bencana. Hal ini merupakan wujud terjadinya ketidakadilan gender yang lebih eksplisit diklasifikasikan menjadi adanya pelabelan negatif atau *stereotype* dan penomorduaan atau subordinasi.

3.2.1 Pelabelan Negatif atau *Stereotype*

Lebih tepatnya *Stereotype* memiliki makna adanya pelabelan terhadap perempuan yang selalu ditempatkan dalam kondisi yang lemah dan tidak berdaya. Perlakuan ini senada dengan yang terjadi pada para pekerja perempuan di perkebunan kopi lereng Gunung Argopuro. Sebagaimana yang dikatakan Muhandari (46), menurutnya alasan perempuan tidak dilibatkan dalam mitigasi bencana karena secara psikologis, perempuan rentan mengalami trauma dan orientasi pikirannya hanya pada domestik.

3.2.2 Penomorduaan atau Subordinasi

Penomorduaan ini terjadi akibat adanya pandangan bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Sehingga jajaran aparat pemerintah seperti TIM BASARNAS, Polisi, TNI, dll. lebih mempercayai kaum laki-laki dan mengutamakan untuk membantu berpartisipasi dalam mitigasi bencana. Kendatipun sebenarnya keaktifan pihak laki-laki dalam mengurangi dampak resiko dari bencana di lereng Gunung Argopuro terbilang masih sedikit.

Disisi lain, ketidakterlibatan perempuan dalam mitigasi bencana juga disebabkan oleh konstruk perempuan terutama para pekerja di perkebunan kopi itu sendiri. Secara tidak langsung mereka memosisikan dirinya sendiri sebagai sosok perempuan yang tidak potensial dalam meminimalisir dampak resiko adanya bencana yang terjadi (Nuriana, Rusyidi, & Fedryansyah, 2019).

Sebagai upaya penghapusan ketidakadilan gender dan peningkatan kesadaran melalui pemberian pemahaman terhadap pentingnya keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam mitigasi bencana, maka terdapat beberapa hal terkait manajemen mitigasi bencana yang termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 33 Tahun 2006 yang harus diketahui, dipahami, dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan mitigasi bencana. Di dalamnya termuat perencanaan dan pelaksanaan tindakan diperlukan sebagai respon efektif dalam menghadapi bencana yang terjadi. Perencanaan dan pelaksanaan yang dimaksud terangkum dalam empat point, yaitu (Hafida, 2019):

a) Tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana. Di kawasan lereng Gunung Argopuro, sebenarnya sudah disediakan peta kawasan rawan bencana, namun hanya pada titik tertentu saja. Seperti di dekat kantor PDP dan di jalan menuju lereng Gunung Argopuro. Sedangkan di sekitar pemukiman masyarakat yang lebih dekat dengan Gunung Argopuro dan pabrik kopi yang berada di bawah kaki gunung belum tersebar peta kawasan rawan bencana. Seharusnya ini menjadi perhatian utama dari pimpinan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) untuk menyediakan informasi berupa peta kawasan rawan bencana tanah longsor dan banjir bandang bagi para pekerja perkebunan kopi. Sebab dengan demikian, para pekerja perkebunan kopi menjadi lebih berhati-hati dalam bekerja serta bisa memprediksi kapan ia harus tetap bekerja atau berhenti saat hujan deras mengguyur kawasan kerja di lapangan perkebunan kopi.

b) Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana. Sosialisasi mitigasi bencana juga pernah dilakukan terhadap ibu-ibu sosialita, namun tidak diberikan secara intensif. Seharusnya sosialisasi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan agar kaum perempuan yang bermukim di kawasan tersebut tidak hanya fokus terhadap apa yang harus mereka kerjakan, tetapi juga memiliki bekal tentang strategi yang harus mereka lakukan baik saat akan menghadapi bencana maupun ketika terjadi bencana. Sebab dengan latar belakang pendidikan yang berbeda melalui sosialisasi ini diharapkan semua karyawan terutama perempuan dapat tersentuh dan terkonstruksi kesadarannya untuk berpartisipasi dalam meminimalisir dampak bencana yang akan terjadi baik material, fisik, maupun psikis.

c) Mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan dan dihindari. Tanah Longsor, membangun tembok penahan atau batu-batu di lereng yang rawan terjadi longsor. Upaya ini dilakukan untuk menahan agar tidak terjadi penurunan tanah. Banjir, membungkus pasir dengan karung. Upaya ini dilakukan untuk mencegah masuknya air ke dalam rumah atau bangunan lain. Menanam batu di pelataran rumah. Upaya ini dilakukan untuk mengetahui batas tumpukan pasir yang terbawa arus banjir. Sehingga dapat mengetahui bagaimana kondisi tanah semula sebelum terkena arus banjir dan mengembalikan tumpukan pasir tersebut ke sungai untuk menghindari dampak yang sama ketika banjir melanda sehingga bangunan menjadi tertimbun. Mengamankan surat-surat penting, seperti ijazah, surat tanah, surat nikah, akta kelahiran, dan lain sebagainya. Upaya ini dapat dilakukan dengan membungkusnya menggunakan plastik atau laminating. Sehingga dapat mencegah kerusakan akibat terkena air. Menyediakan kain anti-serap air. Upaya ini bertujuan untuk memperlambat masuknya air ke dalam rumah. Meletakkan sentral listrik pada dinding atau tempat yang lebih tinggi. Upaya ini dilakukan bertujuan untuk menghindari resiko konsleting listrik.

d) Pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Sebagai tindakan meminimalisir resiko dari bencana yang kemungkinan terjadi sewaktu-waktu, pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana menjadi penting untuk diperhatikan. 1) Mengganti

dinding bangunan dengan batu bata dan semen. Di kawasan lereng Gunung Argopuro masih ditemui beberapa dinding rumah yang terbuat dari kayu. Sehingga perlu adanya renovasi bangunan dengan mengganti dinding dari batu bata dan semen. Hal ini akan dapat meminimalisir kerusakan bangunan akibat arus air saat banjir. 2) Membuat pondasi bangunan lebih dalam. Hal ini ditujukan untuk menjadikan bangunan lebih kokoh dan dapat menahan material-material yang terbawa arus banjir. Seperti batu dan bongkahan kayu. 3) Pengaturan jarak rumah. Di kawasan lereng Gunung Argopuro masih ditemui beberapa rumah yang berdekatan dan tidak memiliki celah selokan yang memadai. Selain itu, jarak rumah yang terlalu berdekatan akan berpotensi menyebabkan air terbungung dan sulit mengalir.

Selain itu juga terdapat kebijakan, strategi, dan manajemen mitigasi bencana yang menjadi pedoman dalam mengurangi resiko terjadinya suatu bencana. Adapun kebijakan yang dimaksud, yaitu (Nastiti, Firawati, Hieriej, & Prabandari, 2016):

a) Membangun persepsi yang sama bagi jajaran aparat pemerintah dan unsur masyarakat sesuai dengan pedoman yang ditentukan. Pedoman tersebut dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Persepsi yang dibangun dalam hal ini dikemas dalam bentuk edukasi mitigasi bencana yang meliputi peta kawasan rawan bencana, peran serta masyarakat baik kaum laki-laki maupun perempuan, serta prosedur pencegahan dan penanganan bencana antara jajaran aparat pemerintah dan unsur masyarakat setempat.

b) Melaksanakan mitigasi bencana secara terpadu dan tekoordinir dengan melibatkan seluruh aparat pemerintah dan masyarakat. Langkah selanjutnya setelah membangun persepsi terhadap jajaran aparat pemerintah dan seluruh unsur masyarakat, maka dalam pelaksanaannya pemerintah harus memandu dan mengkoordinir agar pelaksanaan mitigasi bencana tetap sistematis.

c) Mengutamakan tindakan preventif untuk meminimalisir korban jiwa. Pada bencana tanah longsor, tindakan preventif yang dapat dilakukan adalah dengan membuat terasering lereng-lereng. Aliran-aliran puing dapat diarahkan ke dalam kanal-kanal yang dibangun secara khusus, serta perintang pelindung runtuh batu berupa parit, bendungan pemotong jalur air dan penghambat vegetasi akan dapat melindungi tempat-tempat hunian. Sedangkan untuk mengatasi bencana banjir, tindakan preventif yang dapat dilakukan adalah sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub materi "Hal-hal yang perlu dilakukan dan dihindari".

d) Menggalang kekuatan kerjasama melalui pemberdayaan masyarakat serta kampanye. Masyarakat harus dilibatkan dalam mensosialisasikan peta kawasan rawan bencana secara merata agar seluruh elemen masyarakat dapat mengenali potensi-potensi terjadinya bencana tanah longsor dan banjir bandang sewaktu-waktu. Juga dilibatkan dalam membersihkan sedimentasi, membangun parit, bercocok tanam yang sesuai dengan pencegahan banjir.

Untuk melaksanakan beberapa kebijakan tersebut terdapat beberapa strategi yang bisa digunakan, diantaranya:

a) Pemetaan. Pemetaan kawasan rawan bencana bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam mengantisipasi kejadian bencana alam. Teknik-teknik pemetaan terhadap kawasan rawan bencana banjir dapat dilakukan dengan pemetaan topography dan tingginya kontur di sekitar sistim air, serta estimasi kapasitas sistem hidrologi dan daerah tangkapan air.

b) Pemantauan. Pemantauan dilakukan di daerah vital dan strategis secara jasa dan ekonomi. Pemantauan secara jasa dilakukan oleh TIM BASARNAS, TNI, POLRI, dan aparat pemerintah lainnya. Sedangkan pemantauan secara ekonomi dilakukan oleh Relawan.

c) Penyebaran Informasi. Penyebaran informasi dapat dilakukan dengan memberikan poster tentang tata cara mengenali, mencegah, dan menangani bencana untuk Satuan Koordinator Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATKOR-LAK PB) dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB), serta masyarakat Penanggulangan Bencana (SATKOR-LAK PB) dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB), serta masyarakat Penanggulangan Bencana (SATKOR-LAK PB) dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB), serta masyarakat Penanggulangan Bencana (SATKOR-LAK PB) dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB), serta masyarakat Penanggulangan Bencana (SATKOR-LAK PB) dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB), serta masyarakat Penanggulangan Bencana (SATKOR-LAK PB) dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB), serta masyarakat Penanggulangan Bencana (SATKOR-LAK PB) dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB), serta masyarakat Penanggulangan Bencana (SATKOR-LAK PB) dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB), serta masyarakat Penanggulangan Bencana (SATKOR-LAK PB) dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB), serta masyarakat Penanggulangan Bencana (SATKOR-LAK PB) dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB), serta masyarakat Penanggulangan Bencana (SATKOR-LAK PB) dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB).

Penanggulangan Bencana (SATKOR-LAK PB) dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB), serta masyarakat.

a) Sosialisasi dan Penyuluhan. Sosialisasi dan penyuluhan ditujukan kepada Satuan Koordinator Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATKOR-LAK PB) dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB), serta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan menghadapi bencana jika sewaktu-waktu terjadi. Sosialisasi dan penyuluhan dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai hidup harmonis dengan alam di daerah bencana, hal-hal yang perlu ditakutkan dan dihindarkan di daerah rawan bencana, dan mengetahui cara menyelamatkan diri dari bencana.

b) Pelatihan/Pendidikan. Pelatihan difokuskan kepada tata cara pengungsian dan penyelamatan jika terjadi bencana. Pelatihan lebih ditekankan pada alur informasi dari petugas lapangan, pejabat teknis, SATKORLAK PB dan SATLAK PB serta masyarakat sampai ke tingkat pengungsian dan penyelamatan korban bencana. Dengan pelatihan ini terbentuk kesiagaan tinggi dalam menghadapi bencana.

c) Peringatan Dini. Peringatan dini dimaksudkan untuk memberitahukan tingkat kegiatan hasil pengamatan secara kontinu di suatu daerah rawan bencana agar persiapan secara dini dapat dilakukan guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Peringatan dini disosialisasikan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dengan tujuan memberikan kesadaran masyarakat dalam menghindari diri dari bencana. Peringatan dini dan hasil pemantauan daerah rawan bencana berupa saran teknis dapat berupa pengalihan jalur jalan sementara atau seterusnya, dan pengungsian atau relokasi.

4. Kesimpulan

Pendapatan ibu rumah tangga penyuling minyak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan keluarga di Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kota Majene.

Perlunya pembinaan yang lebih intensif dari instansi terkait baik dari segi teknis pengolahan minyak kelapa, manajemen maupun tampilan kemasan sehingga dapat meningkatkan harga jual produk yang dihasilkan.

Daftar Pustaka

- Bencana, B. N. P. (2016). *Data informasi bencana indonesia*. Jakarta: BNPB.
- Hafida, S. H. N. (2019). Pemberdayaan Perempuan sebagai Bentuk Penguatan Strategi Pengarusutamaan Gender dalam Situasi Bencana di Kabupaten Klaten. *Jurnal SOLMA*, 8(01), 63–72.
- Kurniasari, N. (2017). Strategi Penanganan Krisis Kepariwisata dalam Kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 10(2), 177–189.
- Nastiti, N. N., Firawati, T., Hieriej, E., & Prabandari, A. (2016). Implementasi pengarusutamaan gender dalam sistem penanggulangan bencana di indonesia studi kasus: analisis implementasi renstra BPBD kabupaten sleman di desa kepuharjo kecamatan cangkringan. *Jurnal Dinamika Global*, 1(01), 43–70.
- Nuriana, D., Rusyidi, B., & Fedryansyah, M. (2019). Mitigasi Bencana Berbasis Sensitive Gender. *Share: Social Work Journal*, 9(2), 179–194.
- Rusmadi, R. (2017). Pengarusutamaan gender dalam kebijakan perubahan iklim di indonesia. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(1), 91–110.
- Wulandari, D. (2020). Perempuan dalam konstruksi pemberitaan bencana. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 1(1), 40–53.